Hasil Evaluasi Kinerja Makro Ekonomi Provinsi Bengkulu 2010

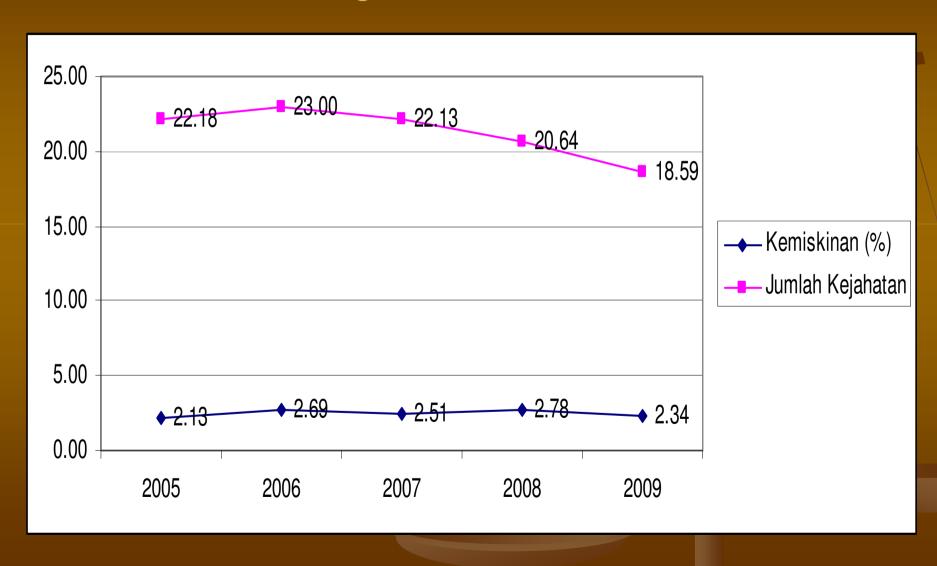
Universitas Bengkulu

Oleh: Benardin, SE, MT

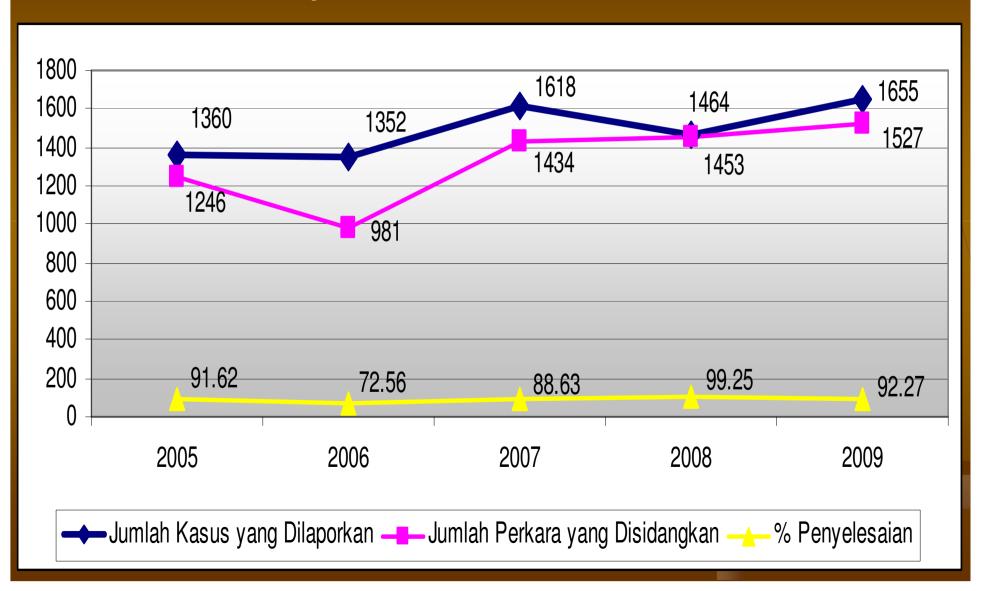
Keamanan dan Kedamaian

- Indeks Kejahatan: cendrung menurun
 - Terkait tkt kemiskinan (inconclusive)
 - Penyelesaian kasus kejahatan konvensional
- Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional: berfluktuasi dan menaik
- Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans
 Nasional: berfluktuasi dan menurun
 - Bukti pendukung

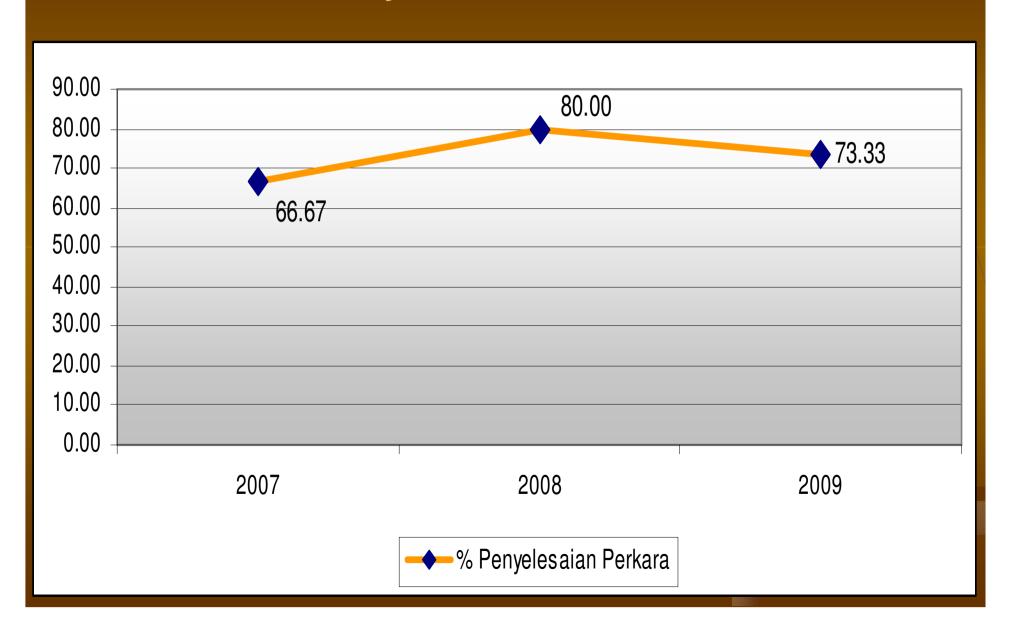
Indeks Kejahatan dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Bengkulu, Tahun 2005-2009



Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional



Kasus Kejahatan Transnasional



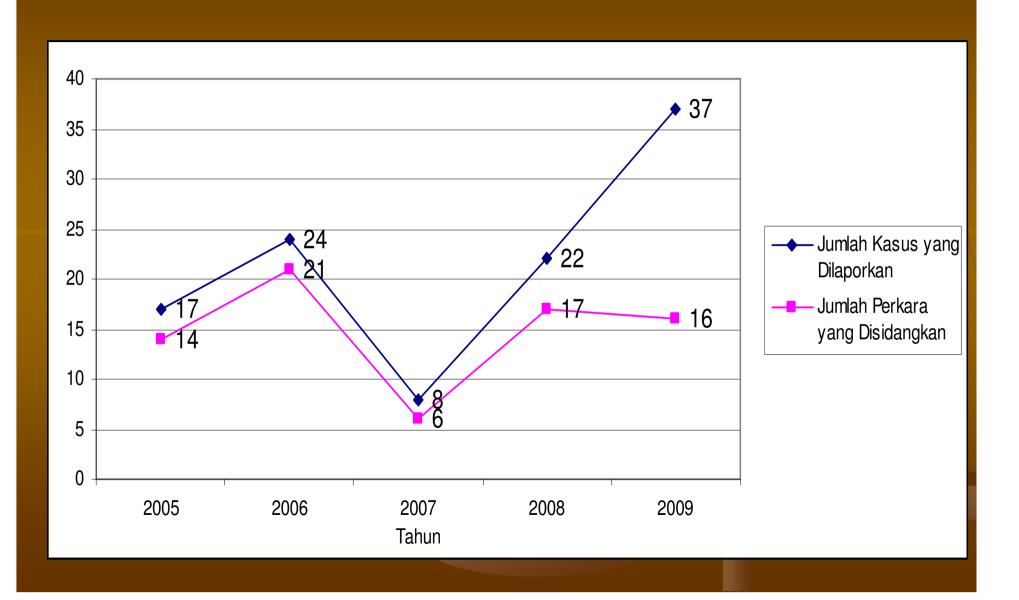
Rekomendasi Meningkatkan Keamanan dan Kedamaian

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat (penurunan angka kemiskinan)
- Penegakan dan keadilan hukum
- Komitmen aparat terkait penegakan hukum (KUHP?)
- Pendidikan hukum dan proses hukum kepada masyarakat (bukti pendukung).

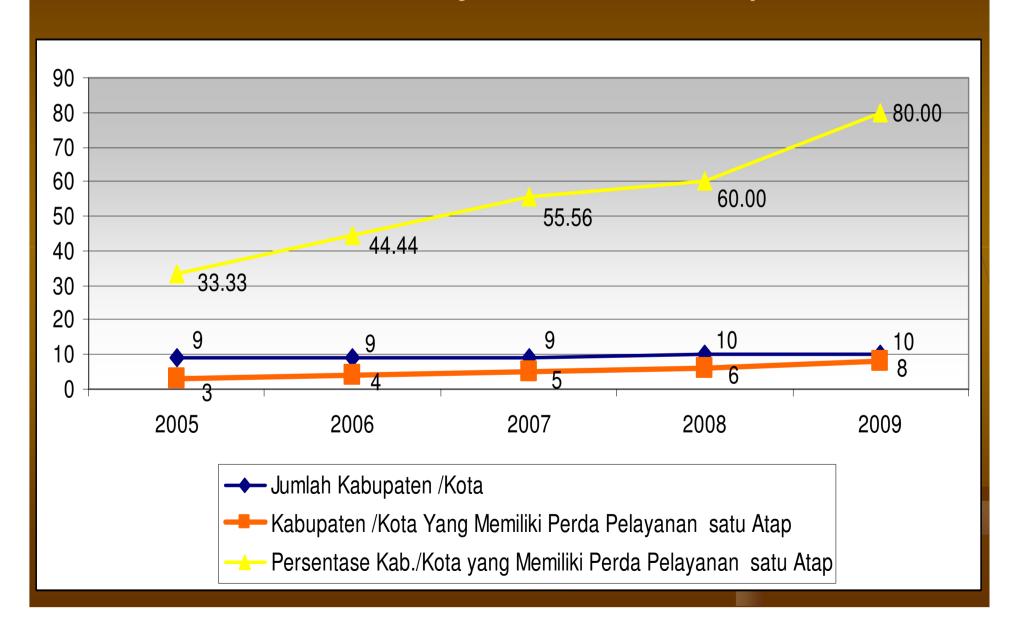
Pelayanan Publik

- Penanganan Kasus Korupsi: berfluktuasi dan menurun
 - Rendahnya kepastian hukum
- Perda pelayanan satu atap: mayoritas (80%) sudah
 - Belum: pemekaran wilayah (kabupaten) baru
 - Tapi tidak meningkatkan investasi (ineffective)
- Keuangan daerah: % WTP Menurun
 - Rendahnya profesionalisme sesuai peraturan
 - Lambatnya proses hukum

Jumlah Kasus Korupsi



Perda Pelayanan Satu Atap



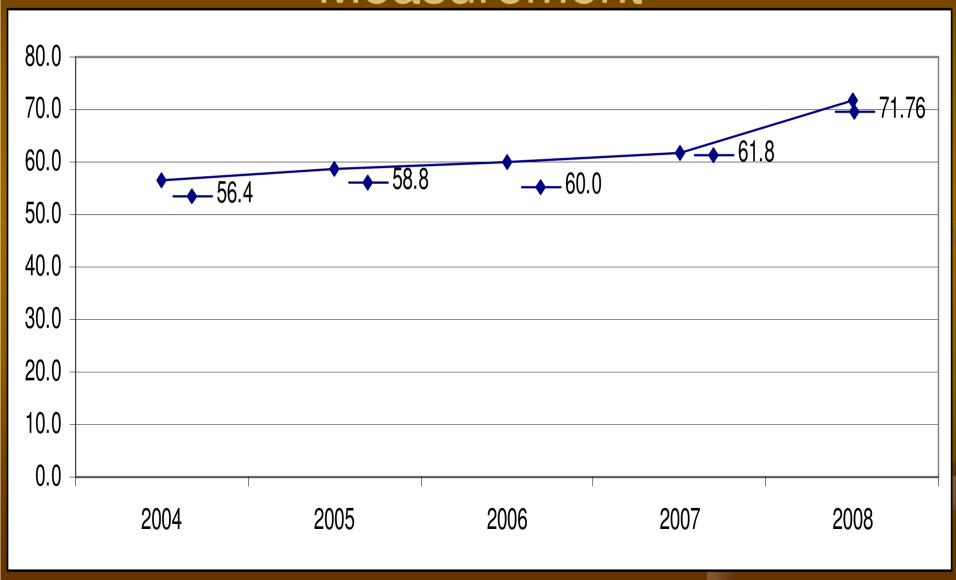
Keuangan Daerah: % WTP

No	Nama Entitas	Opini LKPD				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Provinsi Bengkulu	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
2	Kota Bengkulu	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	Kab.Bengkulu Utara	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
4	Kab.Bengkulu Selatan	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP
5	Kab.Kaur	-	WDP	WDP	WDP	WTP
6	Kab.Mukomuko	-	TMP	WDP	WTP	WTP
7	Kab.Rejang Lebong	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	Kab.Lebong	-	WDP	WDP	TMP	TMP
9	Kab.Kepahiang	WDP	TMP	WDP	TMP	TMP
10	Kab.Seluma	-	TMP	WDP	WDP	WDP
11	Kab.Bengkulu Tengah	-	-	-	-	WDP

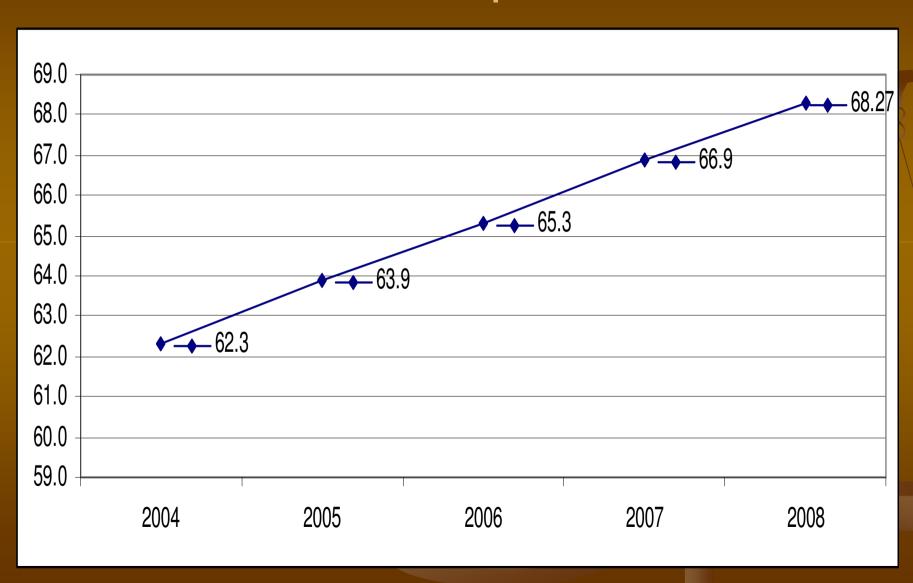
Demokrasi

- Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM): meningkat
 - Peraturan Nasional (DPR/DPRD)
 - Arus informasi sbg sumber pembelajaran
 - Gerakan emansipasi: regional, nasional dan global
 - Tingkat Pendidikan
 - Kelemahan: masih kentalnya kultural

Gender Empowerment Measurement



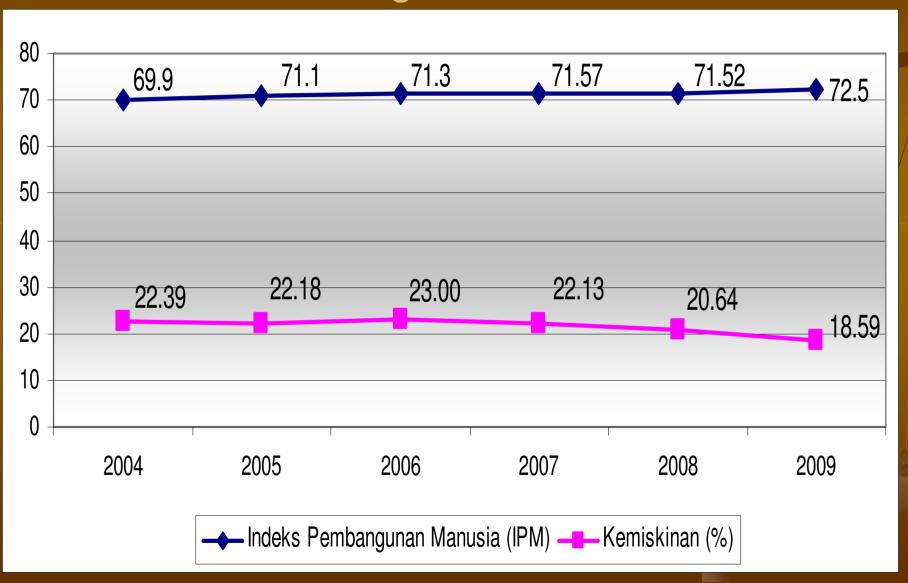
Gender Development Index



Indeks Pembangunan Manusia

- Indeks Pembangunan Manusia: meningkat
 - Derajat Pendidikan Masyarakat meningkat
 - Derajat Kesehatan Masyarakat meningkat
 - Jumlah penduduk miskin menurun
 - Tetapi kondisi Ekonomi Makro negatif (???)
- Rekomendasi:
 - Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat
 - Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
 - Penurunan jumlah penduduk miskin
 - Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi tetapi APBD tidak pro gowth & poor

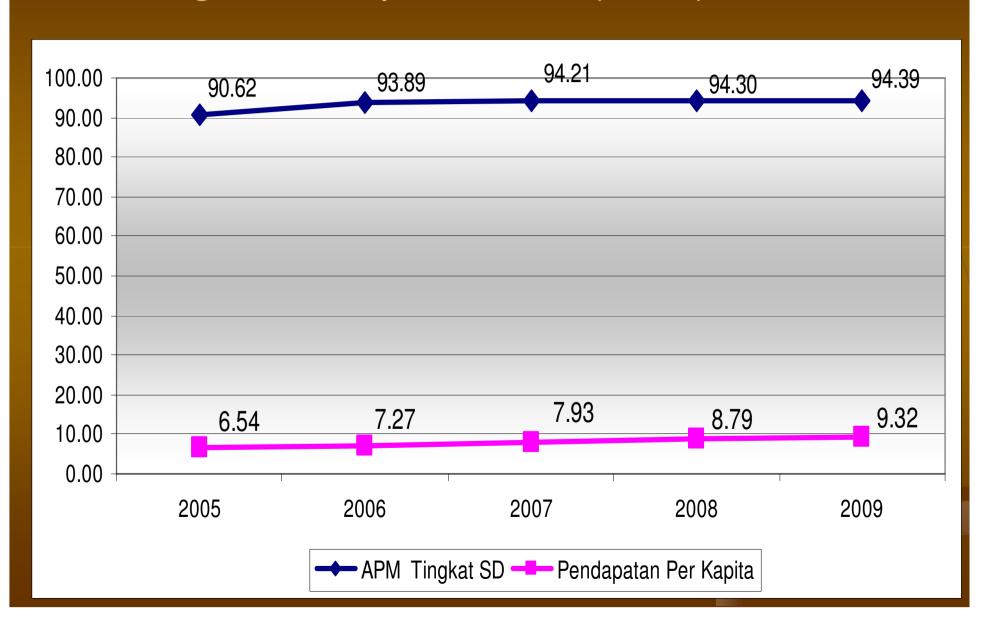
Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan



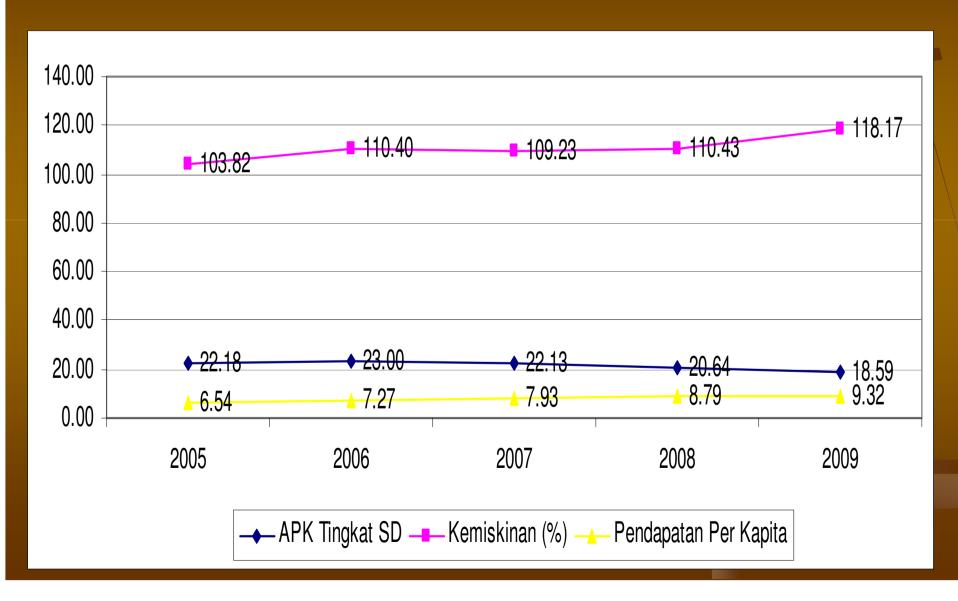
Pendidikan

- Kualitas pendidikan cendrung mengalami kemajuan dari tahun ke tahun untuk semua indikator, kecuali Angka Putus Sekolah (APS) di tingkat SD.
- Berkaian positif dengan:
 - penurunan tingkat kemiskinan
 - jumlah guru berkualitas (layak ngajar)
- Peningkatan APS SD diduga karena terpencil dan kemiskinan (survey)

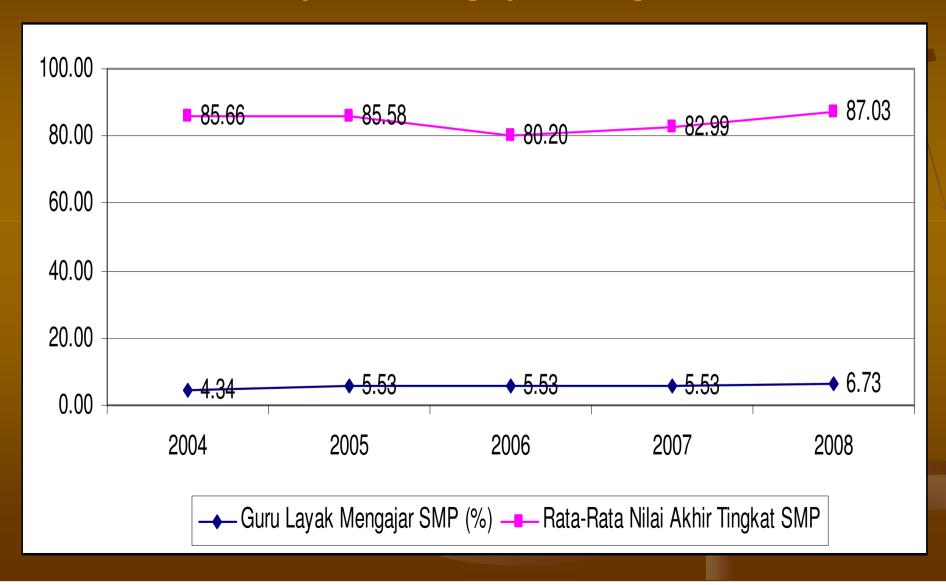
Angka Partsipasi Murni (APM) SD/MI



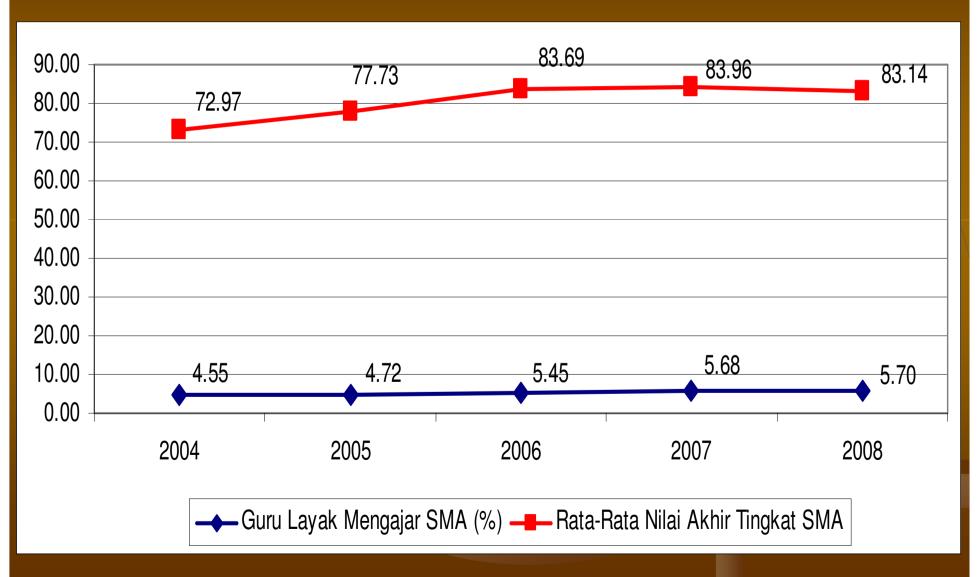
Angka Partsipasi Kasar (APM) SD/MI, Kemiskinan & Pendapatan Perkapita



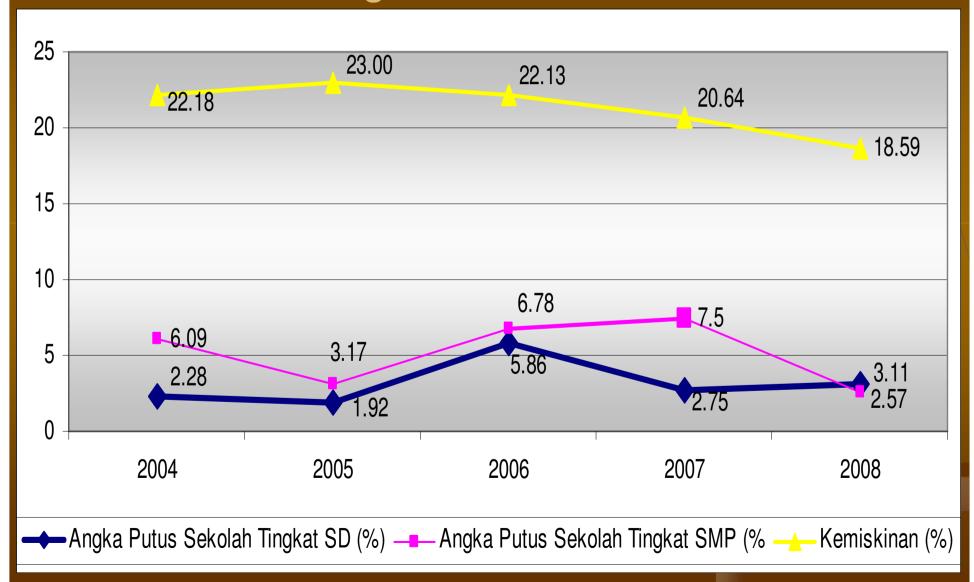
Rata-rata Nilai UN SMP/MTs dan Jumlah Guru Layak Mengajar Tingkat SMP



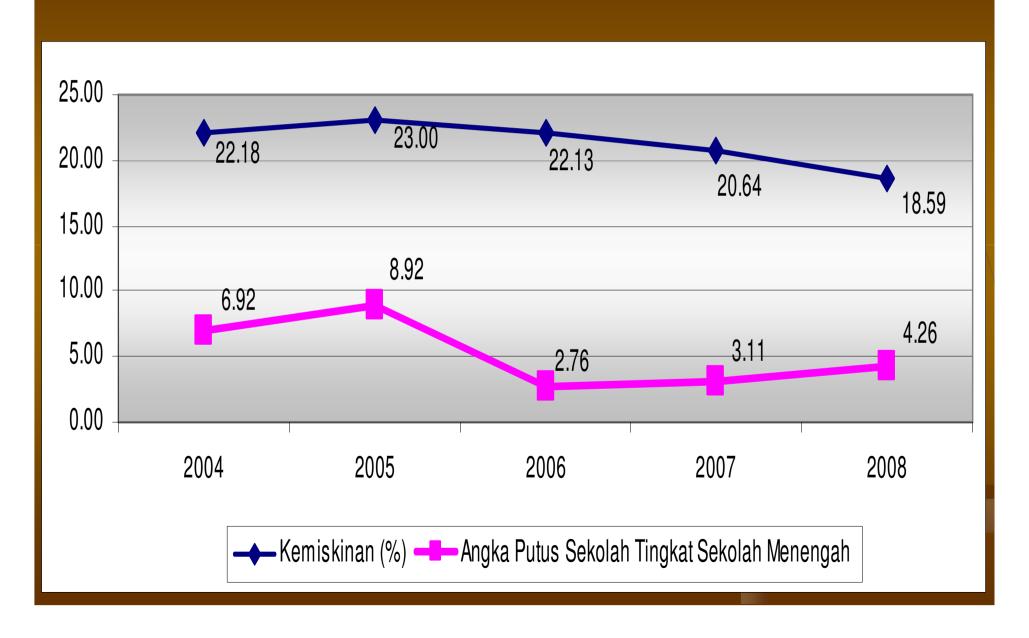
Rata-Rata Nilai UN SMA/SMK/MA & Jumlah Guru Layak Mengajar Tingkat SMA



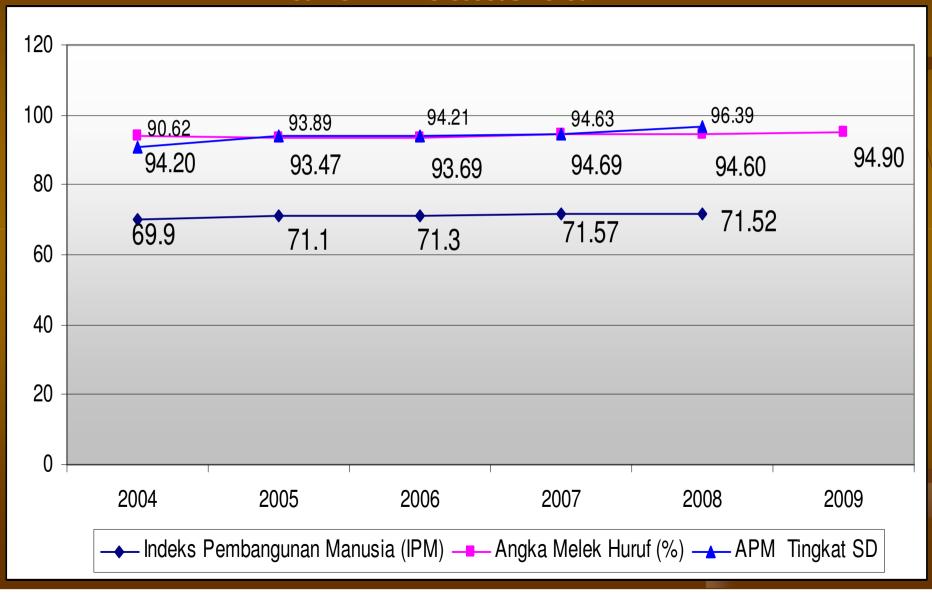
Angka Putus Sekolah SD, SMP/MTs dan Tingkat Kemiskinan



Persentase Angka Putus Sekolah SMA/MA



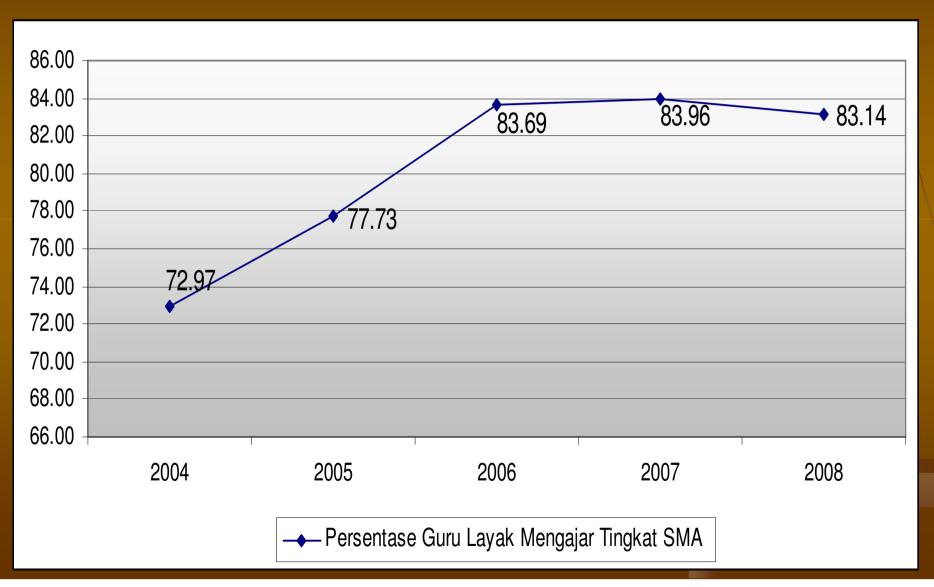
Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas dan IPM



Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar Tingkat SMP



Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar Tingkat Sekolah Menengah



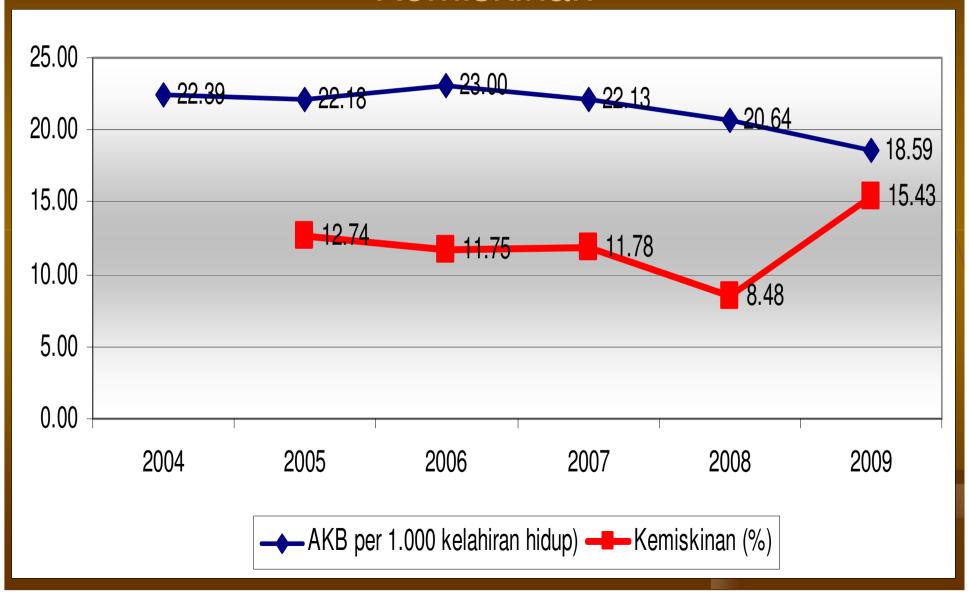
Rekomendasi Untuk Bidang Pendidikan

- Meningkatkan jumlah guru yang layak mengajar (serifikasi)
- Percepatan penyetaraan guru non-sarjana
- Alokasi anggaran pendidikan utk mengurangi biaya tambahan dari orang utk infrastruktur sekolah`
- Pemerataan distribusi pendidikan terutama ke daerahdaerah terpencil
 - Pendirian sekolah
 - Peningkatan akses ke dan dari daerah terpencil
 - Subsidi biaya bagi anak2 dari daerah terpencil
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

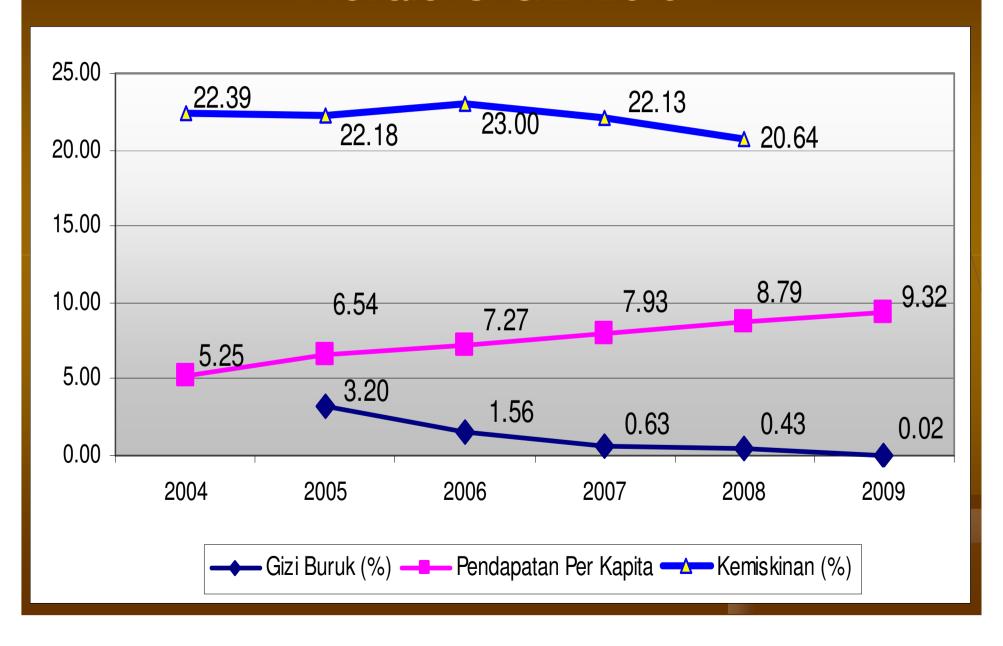
Kesehatan

- Mengalami kemajuan dari tahun ke tahun untuk semua indikator, kecuali Prosentase Jumlah Akseptor KB,
- Faktor:
 - Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan
 - Tingkat kesejahteraan masyarakat
 - Fasilitas kesehatan
 - Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan meskipun masih kurang dari sandard

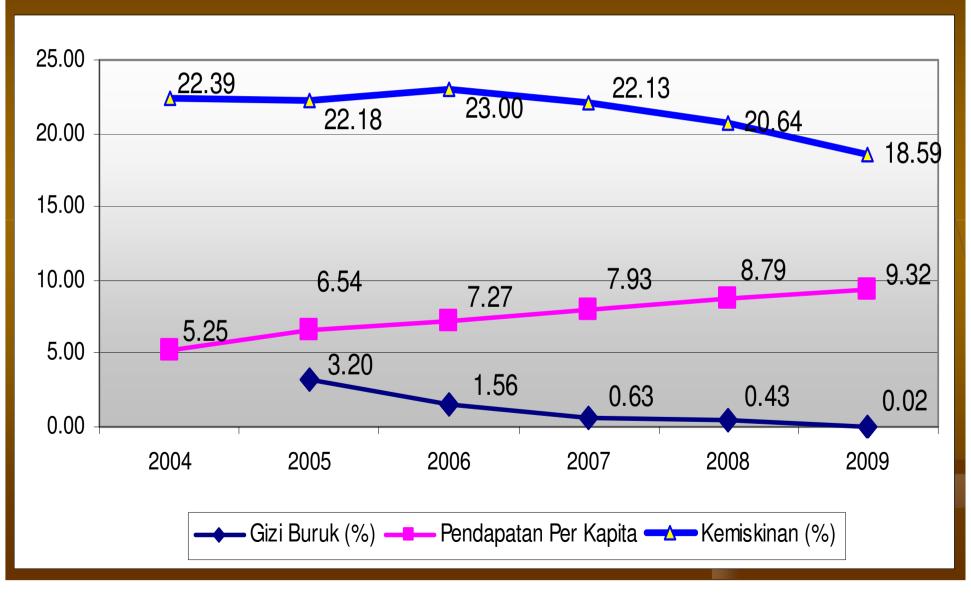
Angka Kematian Bayi dan Tingkat Kemiskinan



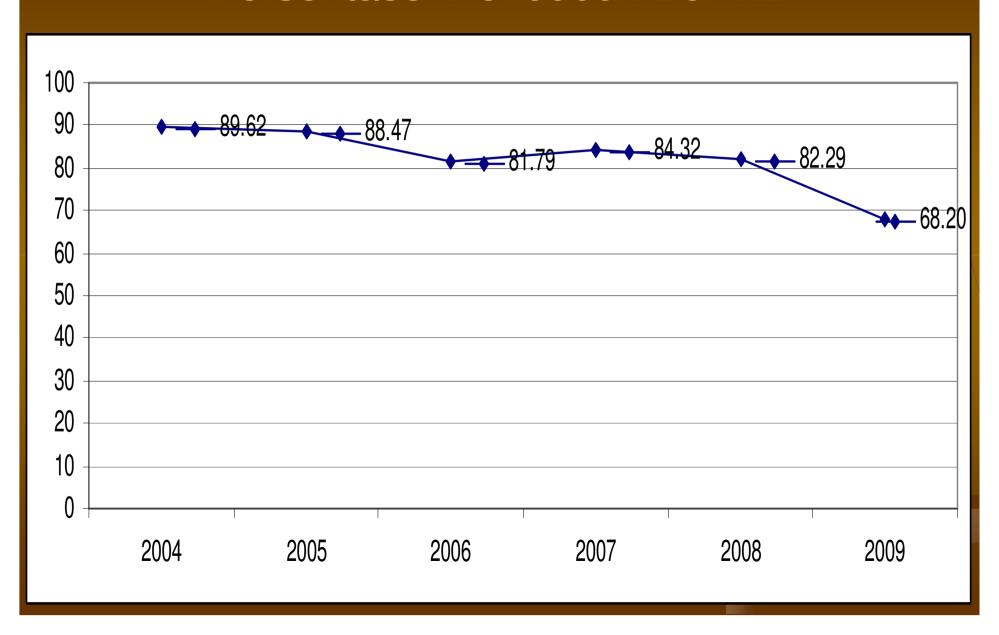
Prevalensi Gizi Buruk



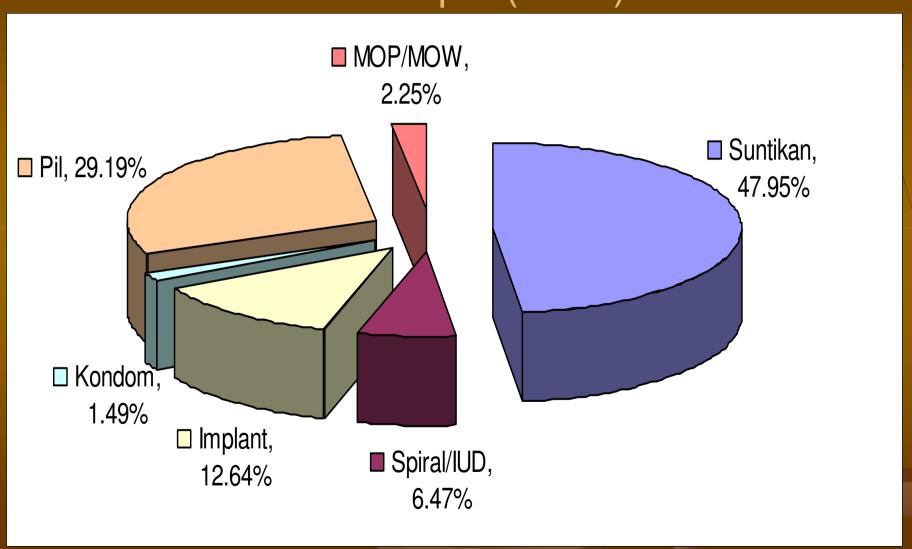
Prevalensi Gizi Kurang, Tingkat Kemiskinan dan Pendapatan per Kapita



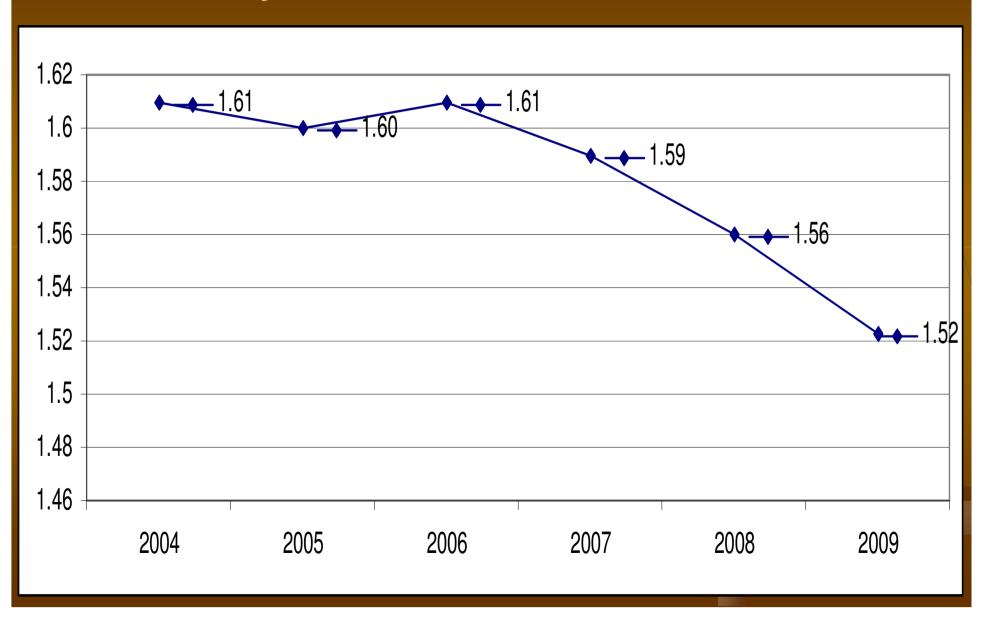
Persentase Penduduk Ber-KB



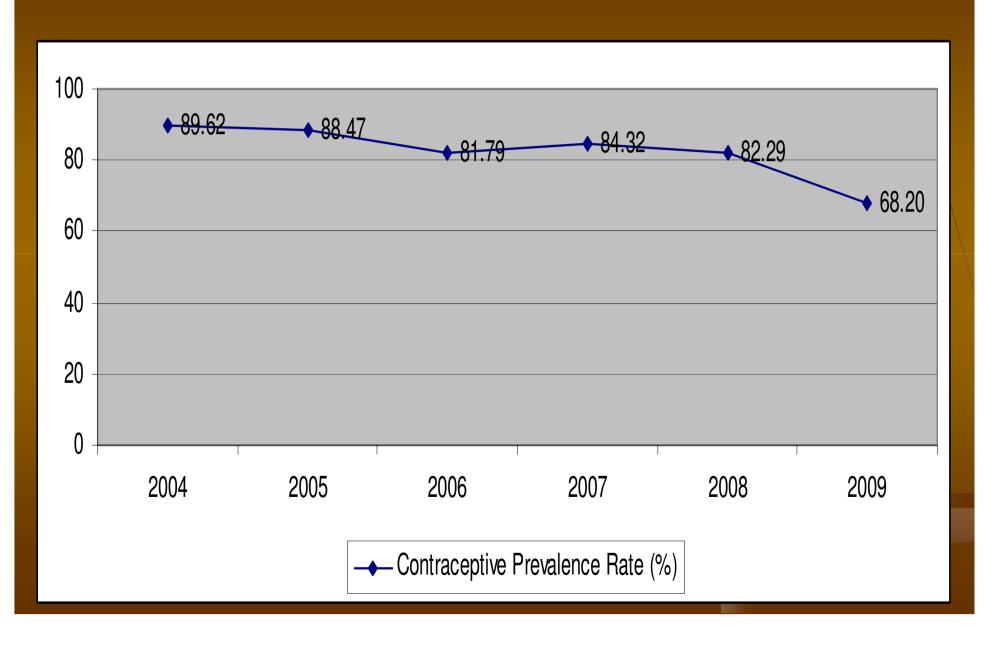
Akseptor Aktif berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi (2008)



Laju Pertumbuhan Penduduk



Total Fertility Rate (TFR)



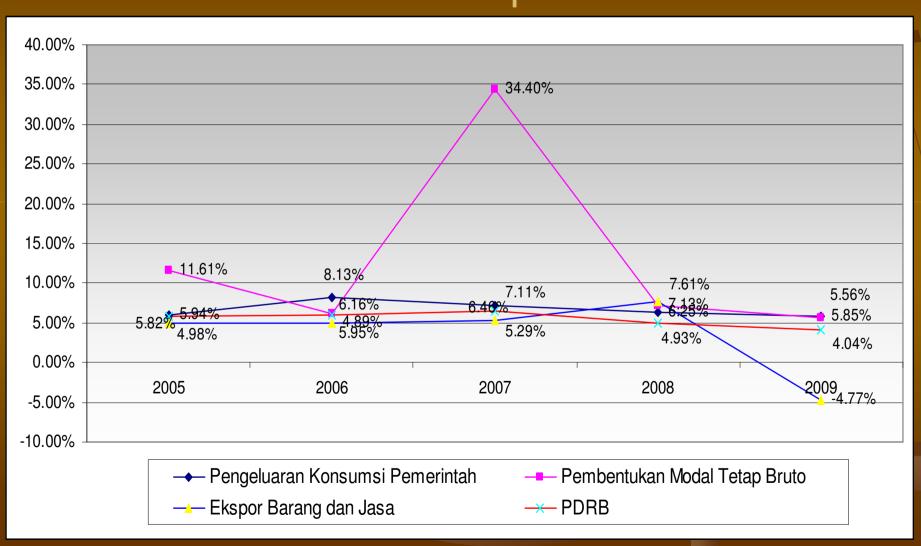
Rekomendasi: Bidang Kesehatan

- Meningkatkan jumlah dan pemeraaan distribusi sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga medis
- Akses dan subsidi bagi masyrakat tidak mampu
- Ekualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat (non-diskriminasi)
- Standard Pelayanan Minimum Kesehatan
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

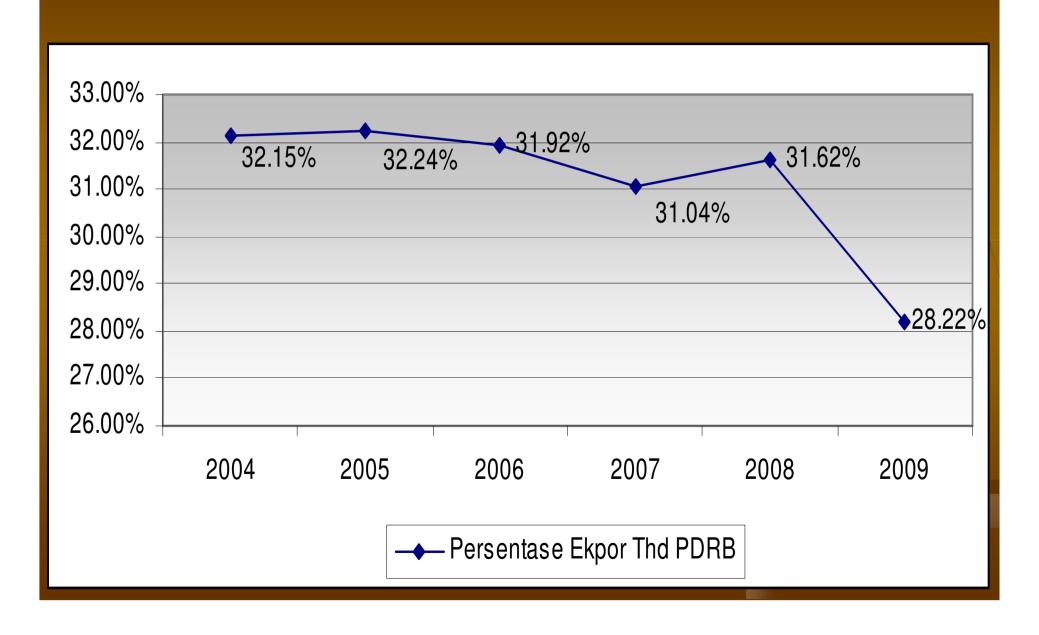
Ekonomi Makro

- Perekonomian mengalami penurunan untuk semua indikator, kecuali:
 - pendapatan per kapita (PDRB-HB)
 - Pendapatan perkapita, tetapi hanya sedikit (ADHB) dan gap dengan nasional semakin besar
- Faktor:
 - Perencanaan Pembangunan yang tidak srategis
 - Inkonsistensi perencenaan dan implementasi
 - Alokasi anggaran
 - Tingkat Kebocoran
 - Krisis
 - Uncertainty
- Fundamenal ekonomi cendrung rapuh dan sensitif tergantung Pengeluaran Konsumsi (pem & swasta)

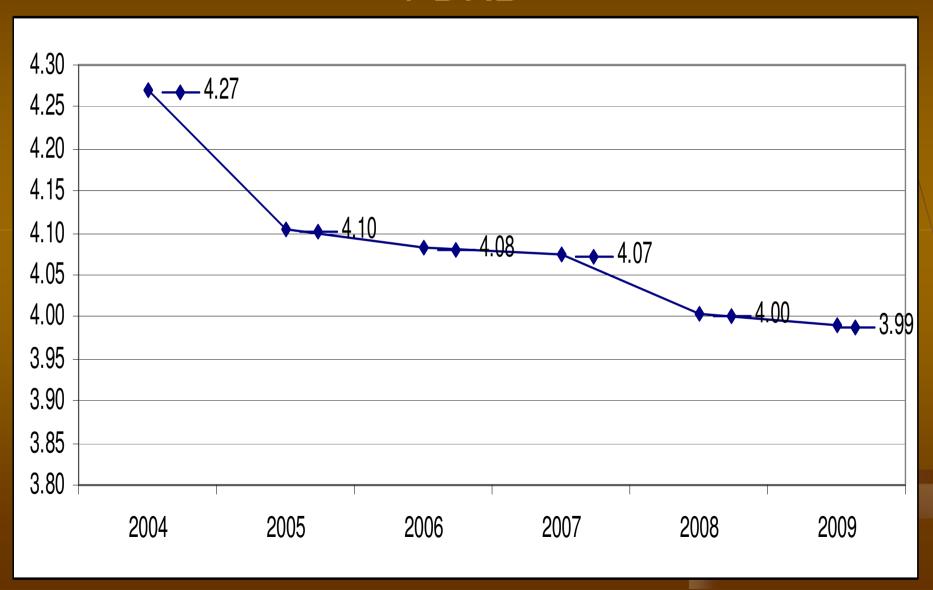
Laju Pertumbuhan Ekonomi,Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal dan Ekspor



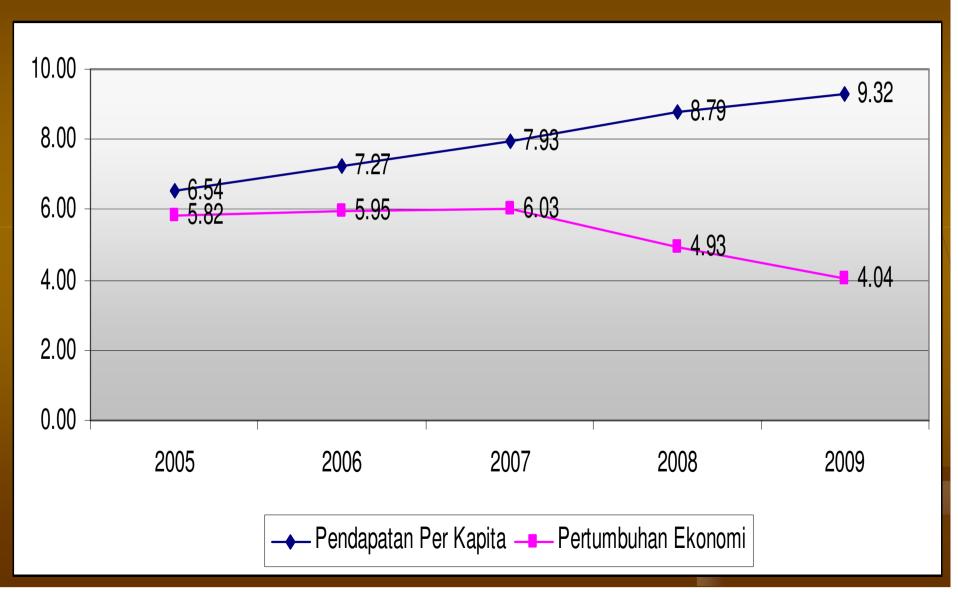
Persentase Ekspor terhadap PDRB



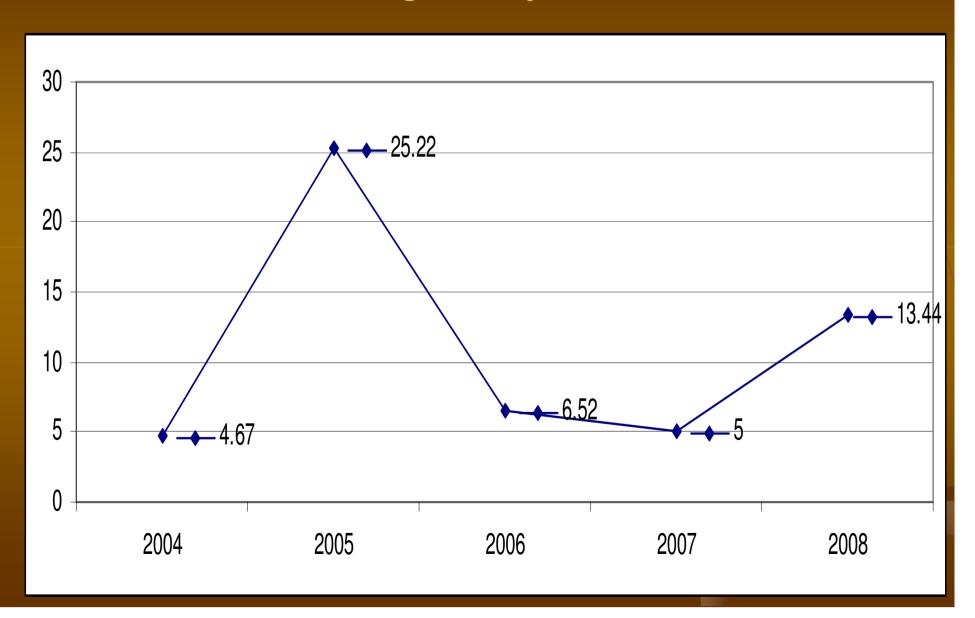
Kontribusi Output Manufaktur terhadap PDRB



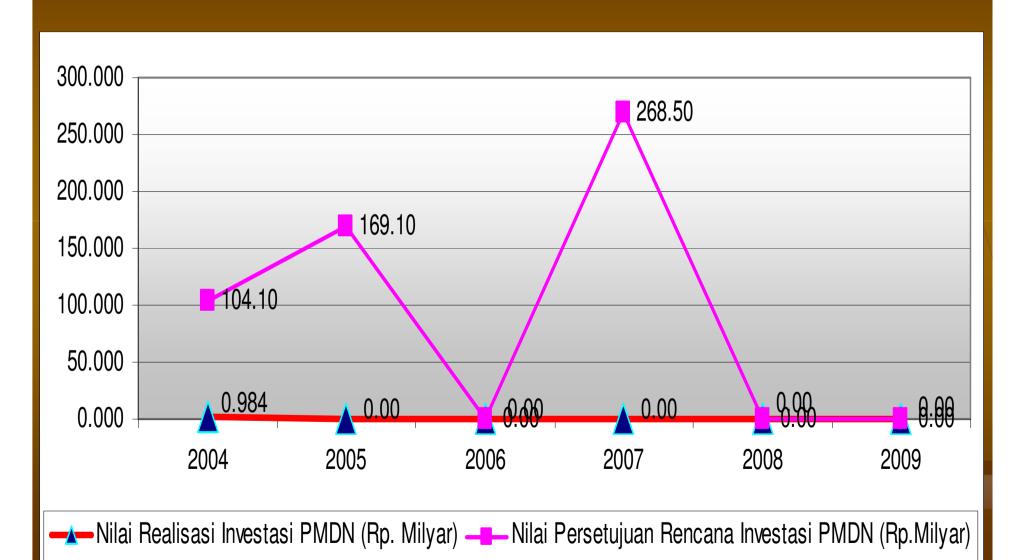
Pendapatan per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi



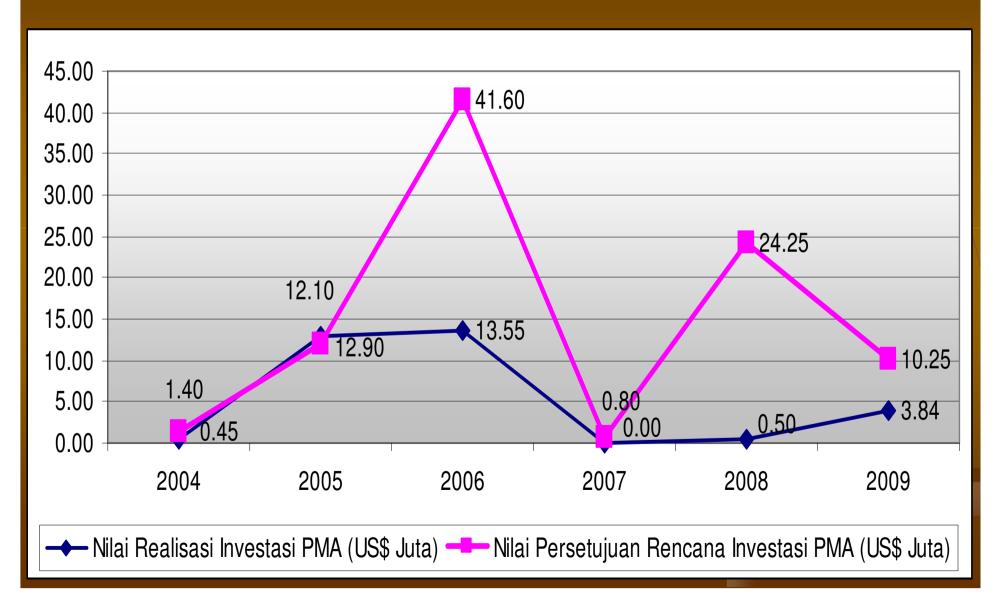
Perkembangan Laju Inflasi IHK



Nilai Rencana PMDN yang Disetujui dan Nilai Realisasi



Nilai Rencana PMA yang Disetujui dan Nilai Realisasi PMA



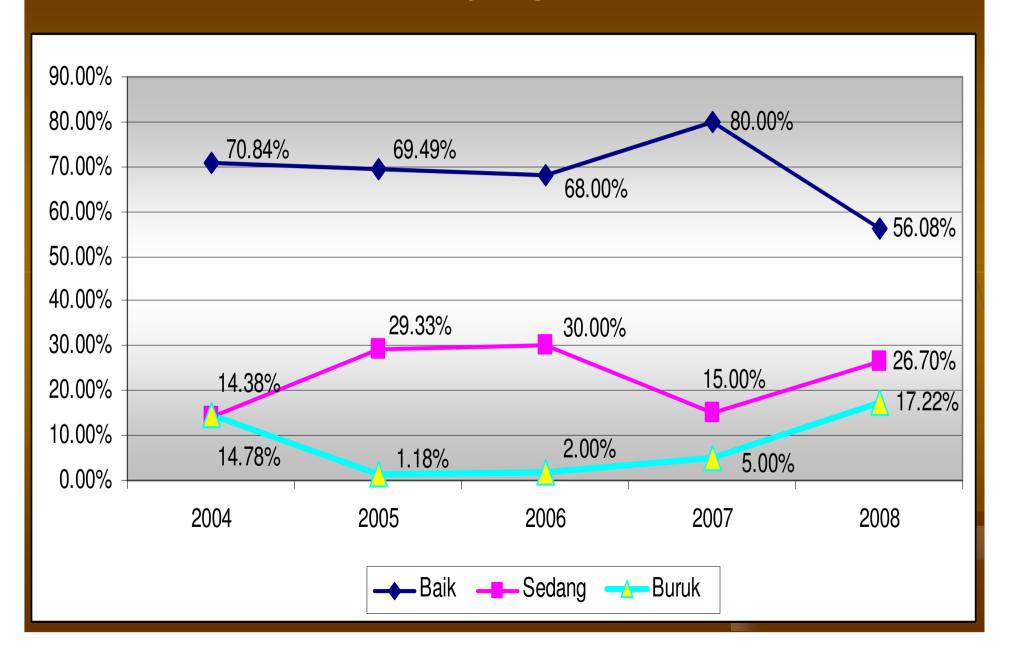
Rekomendasi Ekonomi Makro

- Perencanaan Pembangunan berbasis kondisi (sumberdaya dan persoalan)
- Memperkuat fundamental perekonomian (non-C)
- Suasana usaha yang lebih kondusif
 - Mengurangi barriers to entry
- Ekonomi kerakyatan
- Peningkatan nilai tambah (produkifias)

Infrastruktur

- Mayorias jalan raya mengalami kerusakan di berbagai tempat dalam waktu yang sudah cukup lama
- Faktor:
 - Rendahnya kualitas jalan
 - Lemahnya kontrol
 - Tingginya kebocoran anggaran (banyak kasus)

Persentase Panjang Jalan Nasional



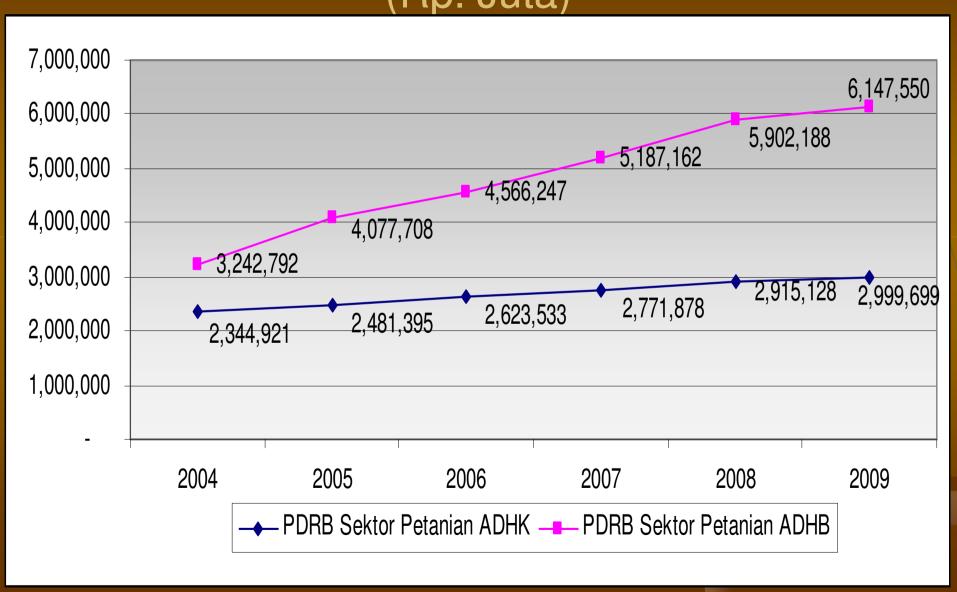
Rekomendasi Jalan

- Peningkatan kualitas jalan,
- Penyesuaian kualitas dan tonase kendaraan yang diijinkan
- Mengutamakan jalan ke sentra produksi
- Menjalankan program pemeliharaan
- Mekanisme Kontrol oleh masyarakat

Pertanian

- PDRB sektor pertanian (ADHK dan ADHB) meningkat dari tahun ke tahun
- IHK (perubahan/kenaikan) PDRB ADHB jauh lebih besar dari PDRB ADHK mengindikasikan inflasi yang cukup tinggi
- Nilai Tukar Petani cendrung meningkat tapi masih di bawah rata-rata prov di Sumatera

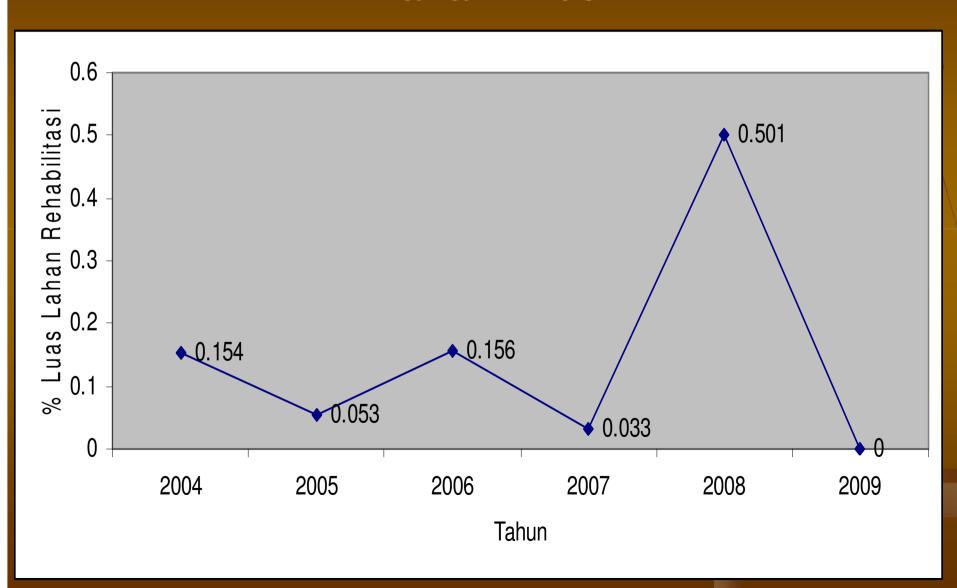
Perkembangan PDRB Sektor Pertanian (Rp. Juta)



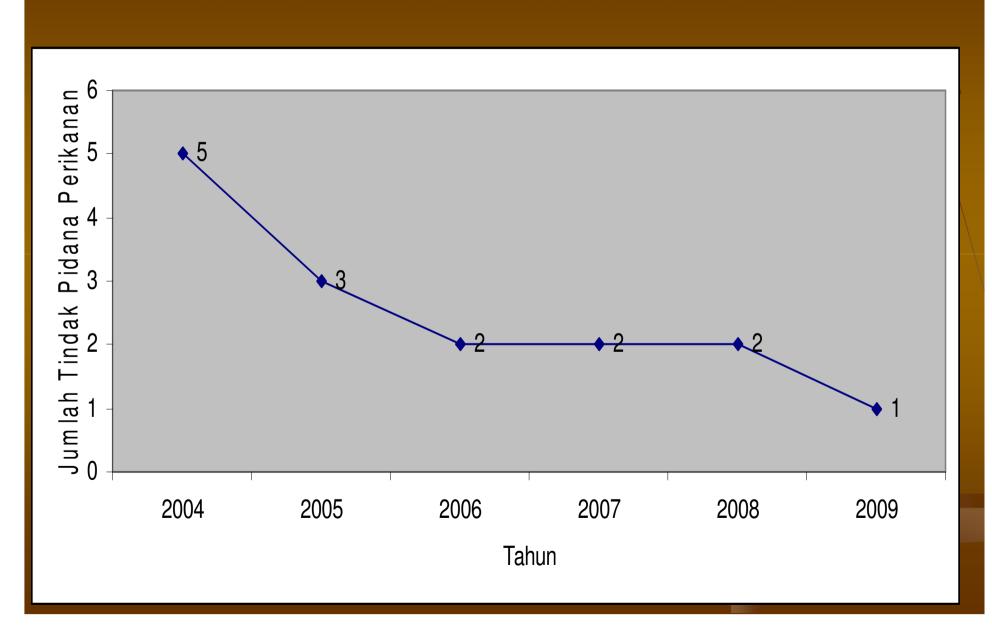


 Prosentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis cendrung menurun

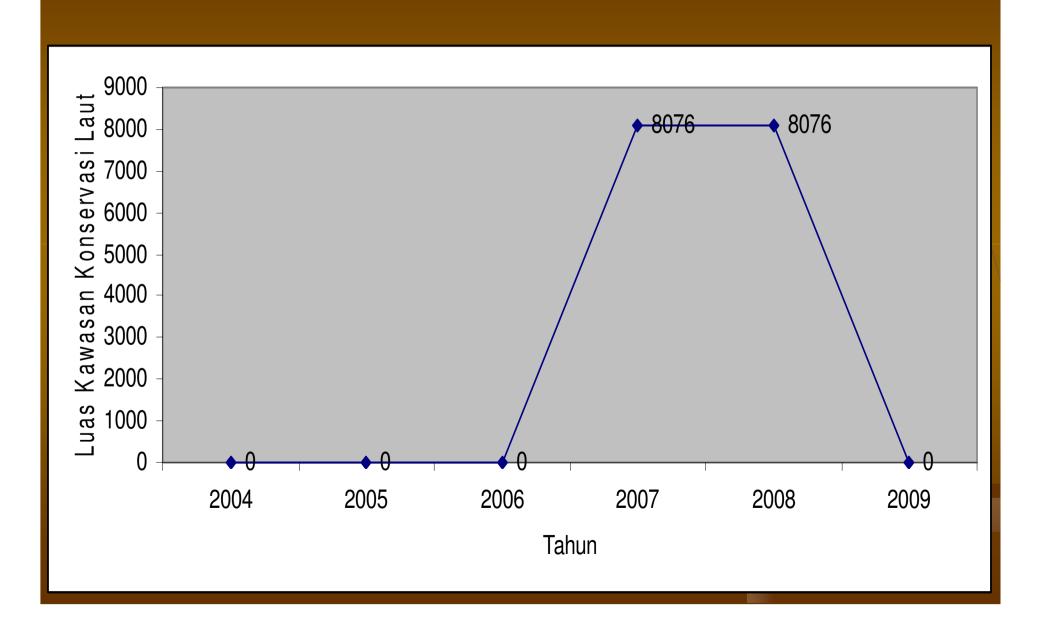
Rehabilitasi (reboisasi) dalam Hutan terhadap Lahan Kritis



Jumlah Tindak Pidana Perikanan



Luas Kawasan Konservasi Laut



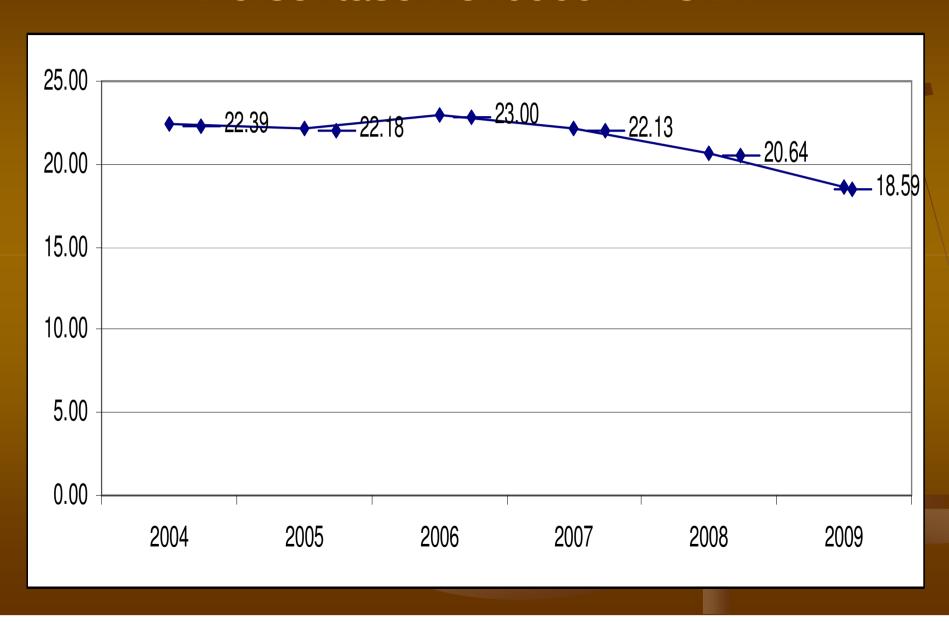
Rekomendasi Kehutanan dan kelautan

- Optimalisasi perlindungan dan konservasi sumberdaya alam kehutanan/kelautan;
- Maksimalisasi upaya rehabilitasi terhadap lahan kritis dari sumberdaya alam kehutanan secara konsisten dan tidak sporadis;
- Pengembangan secara berkesinambungan terhadap daya dukung manajemen/ kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan khususnya di bidang sumberdaya kehutanan;
- Peningkatan kualitas dan akses informasi berkaitan dengan upaya pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan subsektor kehutanan.
- Penegakan hukum: illegal logging & fishing

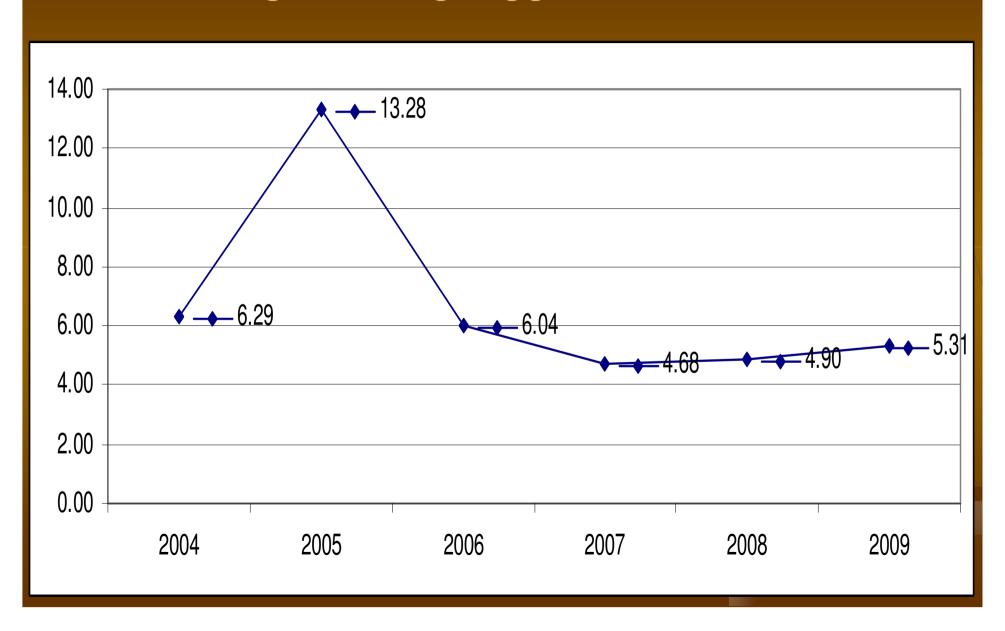
Kemiskinan dan Pengangguran

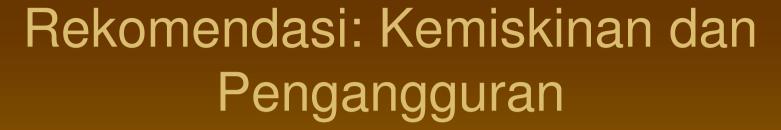
- Tingkat kemiskinan menurun (???) %turun, jumlah meningkat
- Tingkat pengangguran terbuka cendrung naik
- Faktor:
 - Daerah teringgal, sarana dan prasarana terbatas
 - Penanganan belum fokus dan strategis
 - Masih temporer
 - Overlapping
 - Ego sektoral
 - Ineffective & Inefficient

Persentase Penduduk Miskin



Tingkat Pengangguran Terbuka





- Strategi terpadu antar instansi dan unitunit terkait
- Perencanaan berbasis existing condition dan kebutuhan lokal (strategis)
- Berkesinambungan
- Integrated Model

Sectoral, Uncoordinated, Overlapping GOAL **INEFFECTIVE INEFFICIENT**

IINTERDEPENDENCY MODEL ALA BUNGA RAFLESIA



Evaluasi Relevansi RPJMN & RPJMD

- Membandingkan:
 - 11 Rencana Strategis Nasional (RPJMN) dengan Rencana Strategis Daerah (RPJMD)
 - Program-program Kerja masing-masing Rencana Strategis
- Indikator:
 - Relevan
 - Tidak Relevan
 - Program Daerah yg tidak ada di Nasional

Kendala Evaluasi RPJMN & RPJMD Provinsi Perbedaan Periode

- - Periode RPJMN: 2010-2014
 - Periode RPJMD Prov Bengkulu: 2006-2010
- Perbedaan Format Penulisan
 - Menyebabkan perbandingan tidak sepenuhnya dapat dilakukan
- Perbedaan Situasi (existing condiion)
- Perbedaan Fokus Pembangunan
 - Menyebabkan perbedaan Rencana Strategis antara RPJMN & RPJMD
 - Menyebabkan perbandingan tidak sepenuhnya dapat dilakukan

Prioritas Pembangunan Nasional (2010-2014)

Urutan Prioritas	Prioritas Pembangunan Nasional (2010-2014)	
Prioritas 1.	Reformasi birokrasi dan tata kelola	
Prioritas 2.	Pendidikan	
Prioritas 3.	Kesehatan	
Prioritas 4.	Penanggulangan kemiskinan	
Prioritas 5.	Ketahanan pangan	
Prioritas 6.	Infrastruktur	
Prioritas 7.	Iklim investasi dan iklim usaha	
Prioritas 8.	Energi	
Prioritas 9.	Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana	
Prioritas 10.	Daerah terdepen, terluar, tertinggal dan pasca konflik	
Prioritas 11.	Kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi	

Prioritas Pembangunan di RPJMD Provinsi Bengkulu (2006-2010).

Urutan Prioritas/ Misi	Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu, RPJMD (2006-2010).
Prioritas 1.	Memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya.
Prioritas 2.	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan pada berbagai aspek kehidupan, didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Prioritas 3.	Mengembangkan sarana dan prasarana daerah untuk mendukung pencapaian masyarakat yang sejahtera, adil, produktif dan kompetitif.
Prioritas 4.	Menyelenggarakan pemerintahan yang merakyat secara professional, transparan, akuntabel, sinergis, bersih dan berwibawa bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Prioritas 5.	Mendorong berkembangnya masyarakat yang bermoral, berbudaya dan religius.
Prioritas 6.	Mewujudkan sistem politik dan hokum yang memperhatikan dan mengayomi masyarakat, serta mampu membawa kemajuan dan stabilitas daerah.
Prioritas 7.	Menumbuhkembangkan budaya kooperatif, kolaboratif, produktif dan kompetitif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Prioritas 8.	Mendorong terciptanya sistem pertahanan dan keamanan daerah yang mampu menangkal disintegrasi bangsa, menjamin keutuhan NKRI, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Relevansi Prioritas Pembangunan di RPJMD Provinsi Bengkulu (2006-2010) dan RPJMN (2010-2014)

No.	Prioritas Pembangunan Prov. Bengkulu (2006-2010).	Prioritas Pembangunan
		Nasional (2010-2014)
1.	Memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya.	Ketahanan pangan (5) Iklim investasi dan iklim usaha (7)
2.	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan pada berbagai aspek kehidupan, didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Pendidikan (2) Kesehatan (3) Penanggulangan kemiskinan (4)
3.	Mengembangkan sarana dan prasarana daerah untuk mendukung pencapaian masyarakat yang sejahtera, adil, produktif dan kompetitif.	Infrastruktur (6)
4.	Menyelenggarakan pemerintahan yang merakyat secara professional, transparan, akuntabel, sinergis, bersih dan berwibawa bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.	Reformasi birokrasi dan tata kelola (1)
5.	Mendorong berkembangnya masyarakat yang bermoral, berbudaya dan religius.	-
6.	Mewujudkan sistem politik dan hukum yang memperhatikan dan mengayomi masyarakat, serta mampu membawa kemajuan dan stabilitas daerah.	-
7.	Menumbuhkembangkan budaya kooperatif, kolaboratif, produktif dan kompetitif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.	Kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi (11)
8.	Mendorong terciptanya sistem pertahanan dan keamanan daerah yang mampu menangkal disintegrasi bangsa, menjamin keutuhan NKRI, keamanan dan ketertiban masyarakat.	Daerah terdepen, terluar , tertinggal dan pasca konflik (10)
-		Energi (8)

Hasil Perbandingan

- 9 dari 11 prioritas pembangunan nasional (prioritas nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11) berkaitan atau mempunyai relevansi dengan 6 prioritas pembangunan daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 2006-2010 (prioritas nomor 1, 2, 3, 4, 7, dan 8)
- lingkungan hidup dan pengolahan bencana (prioritas 9) terlihat tidak memiliki kaitan langsung dengan salah satu dari delapan prioritas pembangunan daerah Provinsi Bengkulu selama periode 2006-2010.

Irrelevant & Incomparable

- RPJMD Provinsi Bengkulu 2006-2010 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang
- Misalnya, tdk mencakup persoalan bencana (mungkin krn disyahkan pada 2006)
- Sedangkan sejak tahun 2007 hingga kini Bengkulu dianggap daerah rawan bencana gempa
- Belum sepenuhnya mengacu ke perencanaan nasional

Rekomendasi RPJPD

- Sebaiknya/seharusnya lebih spesifik dan lebih fokus (mis unggulan dan pemerataan)
 - dirumuskan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada
 - dipilih yang paling strategis dan bernilai tambah tinggi
 - diurutkan berdasarkan urgensi kebutuhan mayoritas masyarakat
- Sebaiknya/seharusnya dilengkapi dengan dimensi waktu dan alat ukur untuk hasil yang ditargetkan,
- Sebaiknya/seharusnya mengacu kepada prioritas dan rencana aksi pembangunan di tingkat nasional agar terdapat keterkaitan dan relevansi pembangunan di tingkat nasional dan di tingkat daerah.
- APBD yang pro growth & poor

